

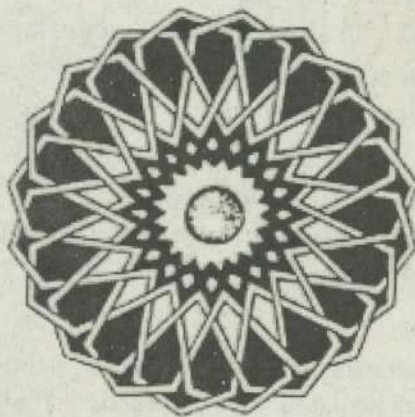
# MENANTANG WACANA RESMI;

## Pergolakan Umat Islam di Bawah

Sejak akhir dekade 80-an hingga 90-an kini, tampak sebuah suasana yang mengisyaratkan adanya upaya saling mendekati antara umat Islam (dalam hal ini gerakan Islam) dengan negara (pemerintah Orde Baru). Hal ini terlihat dari antusiasme para pejabat pemerintah dan para tokoh berbagai komunitas gerakan Islam untuk melakukan kerjasama baik dalam soal-soal sosial keagamaan hingga soal-soal politik. Berbeda dengan dekade sebelumnya, di mana kerjasama itu terbatas pada soal-soal men-sukseskan proyek pembangunan, maka sejak saat itu kerjasama tersebut melebar hingga pada akomodasi kepentingan politik gerakan Islam. "Era baru" hubungan Islam-negara ini ditengarai oleh sikap lunak kedua belah pihak dalam interaksi timbal balik. Pemerintah tidak lagi bersikap keras terhadap gerakan-gerakan Islam yang sempat masuk dalam kategori ancaman "ekstrim kanan", bahkan pemerintah terlihat mensupport kepentingan gerakan-gerakan tersebut. Di lain pihak, berbagai gerakan Islam lambat laun mulai merubah sifat gerakannya dari kecenderungan oposisional yang acap kali radikal menjadi lebih kompromistis. Hubungan yang "lebih harmonis" yang sedang menggejala bisa dilihat dari tingginya frekuensi kunjungan para pejabat pemerintah ke berbagai ormas Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren-pesantren dan kepada para ulama. Pada

kancah politik nasional, aspirasi politik gerakan Islam berupa keinginan memasukkan unsur-unsur syariat Islam ke dalam hukum-hukum negara - yang sebelumnya selalu kandas di sidang-sidang legislatif -, beberapa di antaranya memperoleh keberhasilan. Selain itu, keinginan gerakan-gerakan Islam untuk memasukkan orang-orangnya dalam lembaga legislatif maupun birokrasi pemerintahan juga nampak terakomodir dengan fenomena "ijo royo-royo" di Senayan, Kabinet Pembangunan VI dan di birokrasi. Fase berikutnya, religiositas Islam marak di kalangan elit negara dan simbol-simbol Islam mengemuka pada event-event kenegaraan.

Dalam waktu yang hampir bersamaan muncul situasi yang berbalik arah. Berbagai kerusuhan yang melibatkan sejumlah besar massa rakyat meledak di berbagai daerah. Secara beruntun, kerusuhan massa (yang sebagian besar melibatkan umat Islam kalangan bawah) terjadi di Situbondo, Tasikmalaya, Sanggau Ledo, Tanah Abang, Rengasdengklok, Sumedang, Bandung, Pekalongan, Jember, Madura, Pontianak, Ujung Pandang dan kerusuhan-kerusuhan "kecil" lainnya. Berbagai kerusuhan itu pada umumnya mengarah pada dua sasaran; kelompok agama minoritas dan simbol-simbol negara seperti kantor pemerintah dan kantor aparat keamanan. Dengan demikian berbagai kerusuhan ini mengisyaratkan



munculnya ketidak puasan di kalangan massa rakyat yang tentu saja adalah umat Islam kalangan bawah terhadap pemerintah.

Munculnya dua fenomena yang berbeda bahkan saling menegasikan yang melibatkan pihak yang secara kategoris sama, yaitu umat Islam dan pemerintah Orde Baru menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh. Perbincangan tentang ini, diharapkan bisa melihat dengan lebih cermat tentang hakekat apa yang disebut "era baru" hubungan umat Islam dengan negara yang kini sedang nampak di permukaan, dan berangkat dari amatan itu, ditawarkan alternatif bagi persoalan peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

\* \* \*

Sejak Indonesia merdeka, posisi Islam dalam politik nasional selalu menjadi persoalan yang menimbulkan pertentangan sengit, sehingga pada masa-masa lampau keberadaannya mengakibatkan kemacetan politik, pemberontakan bercorak agama dan kedaerahan serta perpecahan sosial. Persoalan ini bertolak pada perdebatan mengenai peranan yang seharusnya dimainkan oleh Islam dalam masalah-masalah umum negara berkaitan dengan keberadaan umat Islam sebagai mayoritas.

Hubungan yang tegang antara Islam dengan negara sebetulnya adalah gejala umum yang terjadi di dunia Islam. Persoalan antara Islam dan negara dalam masa moderen merupakan salah satu masalah penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas. Diskusi tentang ini bahkan belakangan

*upaya "menghadirkan" Islam dalam kehidupan kenegaraan senantiasa menyebabkan berbagai benturan vis a vis konsep negara bangsa (nation state), nasionalisme, sovereignty (kedaulatan) dan sebagainya*

makin hangat, tatkala antusiasme keislaman melanda hampir seluruh dunia Islam. Berbagai "eksperimen" dilakukan untuk menyelaraskan antara *din* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim; dan eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal sangat beragam.

Untuk kasus Indonesia, "eksperimen" tersebut telah berlangsung 52 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup panjang itu, upaya "menghadirkan" Islam dalam kehidupan kenegaraan senantiasa menyebabkan berbagai benturan *vis a vis* konsep negara bangsa (*nation state*), nasionalisme, *sovereignty* (kedaulatan) dan sebagainya yang dianut Indonesia yang *nota bene* adalah adopsi dari sistem kenegaraan Barat Moderen. "Eksperimen" yang diperjuangkan oleh para aktifis gerakan Islam itu pada umumnya bersandar pada argumen para pemikir muslim tradisional bahwa Islam adalah sebuah sistem kepercayaan di mana agama mempunyai hubungan erat dengan

politik. Islam memberikan pandangan dunia sekaligus kerangka makna bagi hidup individu maupun masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Pada dasarnya, dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (*din*) dan negara (*daulah*). Dengan demikian pada realitasnya komunitas Islam bersifat spiritual sekaligus temporal; "gereja" sekaligus negara.<sup>1</sup> Pandangan ini tampak memperoleh legitimasi historis di mana Nabi setelah hijrah membangun suatu bentuk negara kota (*city-state*) di Madinah yang bersifat ketuhanan. Perjalanan sejarah Islam dari *Khulafaurrasyidin* hingga runtuhnya kekhalifahan Usmaniyah di Turki juga memberikan pembenaran serupa.<sup>2</sup> Sebagai implementasi dari postulat ini,

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, "Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme", (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 1-2.

<sup>2</sup> Ulasan lebih lengkap baca, *Ibid*, hal. 3-5.

maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan ajaran Islam. Berdasar argumen ini, para aktivis gerakan Islam mencita-citakan Indonesia sebagai "negara Islam".

Dari sini, muncul permasalahan. Se jauh pengalaman kesejarahan Islam kontemporer, belum ada konsep yang utuh dan memadai mengenai bentuk dan bagaimana "negara Islam" itu diwujudkan di tengah masyarakat moderen di mana penetrasi Barat sangat dominan di Dunia Muslim. Hal ini bisa dilihat dari keanekaragaman bentuk negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan di berbagai kawasan Dunia Islam. Hingga saat ini, terdapat tiga pola umum sistem kenegaraan di dunia Islam; Sekuler, Islam dan Muslim. Pola Sekuler dianut oleh Turki. Turki memilih jalan politik sekuler "total", memisahkan Islam dari negara dan, karenanya, membatasi peran agama pada kehidupan pribadi; meskipun belakangan di Turki juga terdapat tanda-tanda meningkatnya keinginan kembali kepada politik Islam. Negara-negara seperti Pakistan, Arab Saudi atau Iran, paling tidak secara formal, menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan hukum tertinggi. Sementara kebanyakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia, tampil sebagai negara-negara Muslim.<sup>3</sup>

Dengan demikian, adalah kenyataan bahwa kaum Muslim tidak memiliki model negara Islam yang jelas dan kongkrit dalam sejarah. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya konsensus mengenai apa yang disebut sebagai negara Islam. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya: *Pertama*, negara ideal Madinah (di bawah

pimpinan Nabi dan empat Khalifah) tidak menawarkan rincian yang bisa mengilhami penerapannya di alam moderen dan masa kontemporer. *Kedua*, praktek kekhalifahan yang belakangan, yakni pada pereode Umayyah dan Abbasiyah, hanya menyediakan kerangka sistem dan lembaga-lembaga politik, pajak dan sebagainya. *Ketiga*, kegagalan secara penuh mendirikan negara Islam mengarah pada perumusan cita-cita ideal (hukum Islam dan teori politik) yang paling banter menggambarkan masyarakat utopia yang melulu teoritis dan teridealisasi. *Keempat*, hubungan agama dan negara, -seperti kebanyakan kepercayaan, praktek, dan bahkan wahyu itu sendiri, selama berabad-abad menjadi subyek beragam interpretasi.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, dari masa kemerdekaan hingga kini pendukung gerakan Islam, organisasi-organisasi Islam dan kaum intelektualnya masih mencari-cari corak yang paling tepat dalam "mendudukan" Islam dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Maka, bercermin kepada hubungan yang antagonistik antara kekuatan Islam dengan kekuatan negara dapat dilihat bahwa kesadaran keislaman dan keindonesiaan belum menemukan simbiosis yang utuh dan mapan.

Sebagaimana terlihat semenjak sidang-sidang BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, persoalan kedudukan Islam dalam negara merupakan problem yang krusial. Menanggapi persoalan ini, terlihat ada dua pandangan yang berebut unggul; pandangan yang menghendaki Islam sebagai ideologi negara dan

*Se jauh pengalaman kesejarahan Islam kontemporer, belum ada konsep yang utuh dan memadai mengenai bentuk dan bagaimana "negara Islam" itu diwujudkan di tengah masyarakat moderen*

<sup>3</sup> Lihat, Ibid, hal. 20.

<sup>4</sup> Lihat, Ibid, hal. 22.

<sup>5</sup> Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante, Islam Dan Masalah Kenegaraan*

keinginan untuk memisahkan agama dari negara, yang hampir-hampir berakibat tidak terlaksananya proklamasi kemerdekaan.<sup>5</sup> Pada akhirnya sejarah mencatat bahwa kesepakatan yang mendasari lahirnya Republik Indonesia adalah apa yang termuat dalam UUD 1945, di mana negara bercorak "sekular-religius" dalam arti bukan negara teokratis tetapi menempatkan agama-agama sebagai aspek yang amat penting dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Pancasila sebagai payung bersama (*common denominator*).

Hingga pasca kemerdekaan, persoalan peran Islam dalam kenegaraan belum bisa dituntaskan. Kesepakatan berupa UUD 1945 oleh gerakan Islam bisa disebut sebagai "sikap mengalah" demi tercapainya kemerdekaan dan menjaga keutuhan bangsa. Bukan sebagai hasil dari simbiosis rasa keislaman dan keindonesiaan yang sungguh-sungguh. Hal ini terlihat pada perkembangan berikutnya di mana pendukung gerakan Islam merasa kalah secara politik karena dengan demikian, secara konstitusi Islam tidak mungkin lagi menjadi dasar negara. Maka sepanjang fase berikutnya, gerakan politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara atau minimal memasukkan unsur-unsur syariat Islam ke dalam konstitusi tetap berlanjut meski usaha yang disebut pertama akhirnya pupus oleh Dekrit Presiden 1959. Keberadaan partai-partai Islam dan upaya mereka bersaing dengan partai-partai yang berideologi beragam itu adalah implementasi dari cita-cita itu.

### Islam dalam Kancan Politik Orba

Persoalan tempat Islam dalam negara pada masa Orde Baru masih merupakan problem yang menegangkan. Ketegangan ideologis sebagaimana

terjadi sepanjang Orde Lama, segera kembali muncul dalam kancan perpolitikan mengiringi pergantian rejim.

Bersama lahirnya Orde Baru, sebenarnya muncul harapan besar di kalangan gerakan Islam akan adanya kesempatan bagi mereka mengartikulasikan kepentingannya. Mereka berharap pemerintahan yang baru lahir akan lebih mengakomodir aspirasi umat Islam. Harapan ini muncul karena dampak persaingan antara Angkatan Darat dan persekutuan Soekarno-"kelompok kiri" pada masa-masa akhir Orde Lama sedikit mengangkat peran para aktivis Islam yang dikucilkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Keberadaan mereka menjadi penting ketika Angkatan Darat memanfaatkan mereka sebagai sekutu dalam mengakhiri Orde Lama. Baik Angkatan Darat maupun aktivis Islam merasa prihatin akan arah Indonesia yang semakin ke kiri dan terhadap politik inflasi Sukarno yang amat merongrong ekonomi dan stabilitas negara. Aliansi yang terbangun ini, menumbuhkan optimisme bahwa kelompok Islam akan diberi kekuasaan lebih besar. Akan tetapi persekutuan AD-kelompok Islam segera berakhir menyusul dibubarkannya PKI, runtuhnya pemerintahan Sukarno

*kesadaran  
keislaman dan  
keindonesiaan  
belum menemukan  
simbiosis yang  
utuh dan mapan*

dan lahirnya Orba. Persekutuan ini tidak berumur panjang karena memang terdapat perbedaan ideologis antara AD dan kelompok Islam. AD sebagai bagian dari ABRI memiliki komitmen kepada kukuhnya negara bangsa dengan Pancasila sebagai ideologi final. Sedang kelompok Islam menghendaki diakomodirnya ideologi Islam. Kendala ideologis ini sekali lagi menyebabkan rentannya aliansi yang dibangun.

Terlebih lagi, kelahiran Orde Baru membawa kebijakan dan langkah-langkah pembaharuan

(Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 102-104. Uraian lebih lengkap lihat M. Ali Haidar, "Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik", (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 239-259.

<sup>6</sup> MM.Billah, Peran Ornop dalam Proses Demokratisasi yang Berkedaulatan Rakyat, dalam Rustam Ibrahim, ed. Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000, (Jakarta: CESDA-LP3ES, 1995) hal. 193

ekonomi, sosial dan politik. Orde Baru menampakkan dirinya sebagai kritik atas kebijakan yang ditempuh pemerintahan Soekarno. Jika pemerintah Soekarno lebih berorientasi yang lebih bersifat ideologis, sehingga ideologi-ideologi yang ada mendapatkan ruang yang cukup untuk berkembang dan berkompetisi, maka pemerintahan Soeharto menempuh strategi pembangunan (*developmentalism*) yang bertumpu kepada kebijakan implementasi program (*program oriented*). Untuk itu dicanangkan program dasar yang disebut "tri logi pembangunan" yakni pemantapan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan dengan pendekatan dan strategi yang pragmatis dan *instant* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul.

Apa yang terjadi kemudian hampir sama dengan yang berlangsung di Brazil. Elit militer dalam hal ini AD percaya betul adanya hubungan yang erat antara keamanan internal (*internal security*) dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu penggunaan aparat negara terutama aparat represif untuk menciptakan suatu pola *integral security* sangat diutamakan.<sup>6</sup> Dengan doktrin "dwi fungsi ABRI" elit militer sejak saat itu terus mengendalikan aparat negara baik aparat represif maupun aparat ideologis untuk melakukan restrukturisasi pola hubungan antara negara dengan masyarakat sipil lewat korporatisme negara. Di sini peranan militer meningkat tidak saja sebagai penjaga keamanan tetapi juga soal-soal non militer. ABRI, menurut Ali Murtopo, seorang arsitek politik ORBA, bertugas menjaga kesetabilan politik dan mengamankan pelaksanaan pembangunan melalui strategi *security and prosperity approach*.<sup>7</sup> Di dalam negara yang korporatis itu, negara memegang peran utama untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri dengan tanpa menghilangkan komponen demokrasi lainnya. Dalam rangka ini, partai politik dipaksa untuk

berfusi menjadi tiga partai dengan asas yang sama, asas tunggal Pancasila, mewahtunggalakan organisasi massa dan organisasi profesi. Akan tetapi acap kali, negara juga mempraktekkan korporatisme eksklusiver dengan mengeluarkan dan mengucilkan komponen demokratis yang kritis dan melakukan oposisi baik yang loyal maupun radikal dari percaturan politik.

Sebagaimana paradigma modernisasi pada umumnya, stabilitas nasional kembali menjadi penting. Dengan dasar inilah kemudian elemen-elemen yang diduga merupakan potensi ketidakstabilan dibersihkan. Deideologisasi dan depolitisasi diterapkan dengan sangat rigid dan praktis tidak memperoleh halangan yang berarti.

Oleh karena itu, pemerintahan Orba yang mutlak dikuasai oleh AD kembali dengan leluasa menolak untuk memberikan bagian kekuasaan yang lebih besar kepada kelompok Islam. Tuntutan untuk menghidupkan partai Masyumi dan memberlakukan kembali Piagam Jakarta yang akan menekankan pengakuan negara terhadap Islam dalam tempat yang khusus, jelas-jelas ditolak pada tahun 1968. Bahkan, tokoh-tokoh eks Masyumi, baik yang terlibat dalam pemberontakan maupun tidak, dikucilkan dari percaturan politik. Parmusi, sebagai ganti dari Masyumi, oleh penguasa Orba dipilhkan orang-orang yang benar-benar setia kepada pemerintah. Bahkan pada tahun 73, sebagai bagian dari proyek depolitisasi dan deideologisasi, partai-partai Islam harus berfusi ke dalam PPP dan tidak diperkenankan lagi menggunakan Islam sebagai asas.

Sebagai akibat dari berbagai kebijakan yang dilakukan secara rigid ini kelompok-kelompok non pemerintah termasuk kelompok Islam praktis tidak mungkin mengembangkan kekuatan politiknya, karena ORBA telah berkembang menjadi kekuatan yang hegemonik. Negara berhasil menghegemoni masyarakat. Sebagaimana gambaran Gramsci,

<sup>7</sup> Ali Moertopo, *Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi dan Modernisasi Pembangunan 25 Tahun* (Jakarta: CSIS, 1973), hal. 54.

<sup>8</sup> Richard Bellamy, "Teori Sosial Moderen, Perspektif Italy", terj. Vedi R. Hadis (Jakarta: LP3ES, 1990) hal. 184-185.

hegemoni muncul ketika negara secara ideo-politis telah mendominasi masyarakat dan kekuatan sosial politik lainnya.<sup>8</sup> Bahkan menurut Ben Anderson, negara telah bangkit dan mengungguli masyarakat dan bangsa. Adanya penataan kelembagaan melalui strategi sosial politik, ekonomi dan keamanan yang lebih mengutamakan kepentingan negara menandai hegemoni itu. Pemerintah hanya melayani kepentingannya sendiri (*self serving*) dan memperbesar kekuasaannya sendiri (*self aggrandising*).<sup>9</sup> Posisi hegemonik negara atas masyarakat, ditunjukkan dengan kemampuannya mengontrol masyarakat sipil (*civil society*) antara lain melalui serangkaian kebijakan yang semakin memarginalisasikan posisi politik massa. Di sisi lain, posisi birokrasi diperkuat, stabilitas dijaga, konflik dieliminasi dan politik massa diambangkan.

Rekayasa politik yang sistematis ini pada gilirannya telah berhasil menjinakkan kekuatan-kekuatan yang radikal sekalipun.

Sementara di sisi lain, kekuatan-kekuatan politik di luar birokrasi seperti partai politik, parlemen, pers, ormas dan kelompok-kelompok kepentingan dibuat tidak mampu mengembangkan kontrol sosialnya. Sebaliknya, birokrasi yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara menjadi

kekuatan yang dominan dalam menentukan tujuan-tujuan politik negara, pengambilan keputusan nasional dan kebijakan pemerintahan. Inilah yang oleh Karl D. Jackson disebut sebagai fenomena "masyarakat politik birokratik" (*bureaucratic polity*). Yakni suatu sistem politik yang kekuasaan dan partisipasi politik dalam pembuatan keputusan berada dalam otoritas para penguasa negara, terutama para perwira militer, dan pejabat tinggi birokrasi termasuk di dalamnya para teknokrat.<sup>10</sup> Dan menurut W. Liddle dalam sistem politik Orde Baru terdapat apa yang ia sebut "piramida Orde Baru" yang terdiri dari lembaga kepresidenan yang

dominan, militer yang aktif dalam politik, birokrasi yang menjadi pusat pengambilan keputusan serta pola hubungan negara dan masyarakat yang memadukan kooptasi, responsi dan represi.<sup>11</sup>

Meskipun

begitu, bukan berarti keberadaan kelompok-kelompok Islam baik yang bergabung dalam PPP maupun yang berada di luar menjadi impoten sama sekali. Bersama romantisme perjuangan yang masih menyala, mereka menerapkan kebijakan yang aktivis dan sering konfrontatif. Wujudnya antara lain upaya memperjuangkan pemuatan hukum-hukum Islam dalam konstitusi, penguasaan badan pembuat undang-undang yaitu DPR dan acap kali

*pemerintahan Soeharto menempuh strategi pembangunan (developmentalism) yang bertumpu kepada kebijakan implementasi program (program oriented)*

<sup>9</sup> Benedict R. OG. Anderson, *Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective*, *Journal of Asian Studies* 62, 3 (May 1993), sebagaimana di kutip M. Syafii Anwar dalam artikelnya "Islam, Nagara, Dan Formasi Sosial Dalam Orde Baru, Menguak Dimensi Sosio-Historis Kelahiran dan Perkembangan ICMI", *Ulumul Qur'an*, Volume III, no. 3 th. 1992, hal. 11 (suplemen).

<sup>10</sup> Karl D. Jackson, *Bureaucratic polity: A Theoretical Framework*, dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, eds, *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1978), seperti dikutip M. Syafii Anwar, dalam op.cit. hal. 12 (suplemen).

<sup>11</sup> R. W. Liddle, *Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions*, dalam *Pacific Affairs*, no. 58, 1995, sebagaimana dikutip M. Syafii Anwar, op.cit. hal. 12.

<sup>12</sup> Dewi Fortuna Anwar, "Kaabah dan Garuda: Dilema Islam di Indonesia?", *Prisma* No.4, April 1984, Tahun XII, Dewi, op.cit. hal. 14.

perjuangan fisik. PPP dengan simbol Ka'bah masih merupakan kekuatan utama oposisi, baik sebagai tanda kesetiaan kepada Islam maupun karena suatu kekecewaan yang lebih umum terhadap pemerintah. Sikap oposisi kelompok Islam yang bergabung dalam PPP maupun bukan, terutama sebagai reaksi atas kebijakan Orba yang merugikan Islam.

Dalam situasi demikian, Orba semakin bersikap keras terhadap kelompok Islam. Dalam rangka mengurangi legitimasi klaim Islam sebagai mayoritas, —yang dengan demikian Islam tidak lagi sah menuntut kekuasaan yang lebih besar— pemerintah mengakali sensus dengan menggolongkan orang yang tidak menjawab “ya” atas pertanyaan “Dapatkah anda membaca Al-Quran”, sebagai bukan Islam. Cara lain yang ditempuh adalah mendorong pertumbuhan agama-agama atau kepercayaan saingannya. Akibat kebijakan ini, penyebaran Kristen meningkat. Dalam 20 tahun semenjak Orba lahir, gereja Kristen meningkat 4 kali lipat sedangkan jumlah pemeluk Kristen berlipat dua. Pada masa itu, sejumlah besar orang-orang Kristen duduk dalam birokrasi. Berkaitan dengan usaha meruntuhkan klaim mayoritas kelompok Islam, pemerintah juga beradil besar pada perkembangan Kebatinan Jawa bahkan diberi status resmi yang sederajat dengan agama-agama yang telah ada. Pada tingkat yang lebih praktis, pemerintah juga berusaha membatasi jama'ah haji oleh karena kekhawatiran akan masuknya pengaruh Islam militan yang sedang

marak di Timur Tengah melalui jama'ah haji.<sup>12</sup> Kenyataan ini, memancing kemarahan kelompok-kelompok Islam yang semakin yakin bahwa pemerintah memang anti Islam. Sementara itu, di kalangan militer semakin tumbuh kecurigaan terhadap aktivis-aktivis Islam sebagai akibat doktrin “ekstrim kanan” untuk menyebut gerakan Islam. Fenomena ketegangan antara kelompok Islam dengan Orde Baru sering dilihat sebagai puncak dari pertarungan panjang antara kekuatan Islam dan tradisi abangan Jawa, yang berakhir dengan kemenangan mutlak bagi kaum abangan. Paling tidak hingga akhir 1980-an, hampir semua upaya para aktivis Islam mengalami kegagalan. Mereka tidak cukup kuat untuk membuat pemegang kekuasaan mengakomodir tuntutan mereka.

*Di dalam negara yang korporatis itu, negara memegang peran utama untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri dengan tanpa menghilangkan komponen demokrasi lainnya*

Pergeseran Kebijakan; “Politik

Akomodasi Islam”

Pada dua puluh lima tahun pertama di bawah pemerintahan Orde Baru telah terjadi perkembangan gerakan Islam yang berlawanan arah akibat ambivalensi kebijakan-kebijakan pemerintah. Di satu pihak menunjukkan gambaran bahwa sebagai kekuatan politik formal, Islam telah berhasil di gusur dari panggung politik oleh kebijakan “dealiranisasi” atau *dekonfessionalisasi* yang dilakukan pemerintah. Sedang di pihak lain, kekuatan politik informal Islam berkembang dengan baik.<sup>13</sup>

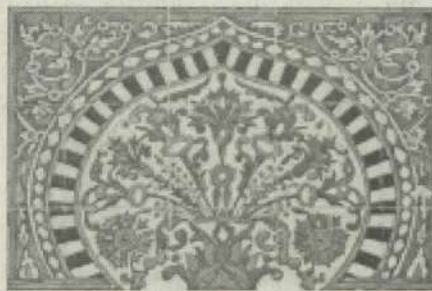
Ambivalensi kebijakan pemerintah tampak jelas ketika pemerintah merekayasa peminggiran

<sup>13</sup> Abdurrahman wahid, “Islam, Negara dan Demokratisasi”, dalam Arief Afandi, (ed.), “Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 107.

<sup>14</sup> M. Syafii Anwar, op.cit. hal.13.

kekuatan politik formal Islam dan pada saat yang sama pemerintah membutuhkan legitimasi dari umat Islam dalam mensukseskan program-program pembangunannya. Kebutuhan untuk memperoleh legitimasi bagi program-program pembangunan membuat pemerintah harus melibatkan kelompok-kelompok strategis khususnya kelompok Islam.

Jumlahnya yang sangat besar menyebabkan ia tidak dapat begitu saja mengabaikan golongan ini dalam upayanya memperoleh legitimasi bagi program-programnya. Lebih dari itu gerakan-gerakan Islam dengan responnya yang konstruktif memungkinkan tumbuhnya ketergantungan parsial di pihak



pemerintah kepada gerakan-gerakan Islam, seperti dalam masalah-masalah KB, Transmigrasi, lingkungan hidup, perbaikan gizi keluarga, peningkatan etos kerja, pendidikan secara keseluruhan, pemeliharaan stabilitas sosial-politik, dan perkembangan hukum nasional. Ketergantungan itu menjadi semakin nyata dengan terjadinya dinamika antara berbagai pusat-pusat kekuasaan (*power centers*) yang bercatur di tingkat nasional. Akibatnya, meskipun kekuatan politik formal Islam bisa disebut telah habis, namun di pihak lain potensi gerakan-gerakan Islam sebagai kekuatan politik informal berkembang dengan baik. Maka lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan Islam dan kekuatan kepemimpinan non formalnya semakin kuat.

Pada bidang pendidikan, yang berlangsung di kalangan umat Islam, bisa dikatakan konstan bahkan terjadi peningkatan. Bersama meningkatnya kesadaran pentingnya pendidikan dan disertai membaiknya taraf ekonomi, sebagian besar umat Islam mengarahkan masa depan anak-anak mereka dengan jalan menyekolahkan mereka ke sekolah-sekolah moderen. Hal ini dimungkinkan karena bidang ini relatif independen dalam arti tidak banyak menyediakan ruang bagi pemerintah

untuk ikut campur alih-alih memonopoli. Peluang ini semakin terbuka bersama kebijakan pendidikan Orde Baru yang memberikan kesempatan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh umat Islam hingga lebih memberikan kemungkinan bagi berkembangnya lapisan menengah muslim secara massif. Meningkatnya taraf pendidikan mendorong mereka ke dalam komunitas kelas menengah. Maka dari jalur inilah pertumbuhan kelas menengah muslim "baru" meningkat.

*Intellectual booming*, ledakan kaum terpelajar santri yang memiliki kemampuan intelektual dan teknikal tinggi

ini, yang terjadi pada akhir 70-an, mendorong mobilitas golongan santri baik secara horisontal maupun vertikal. Mobilitas horisontal ditandai dengan penyebaran profesi kaum santri ke berbagai sektor kegiatan, sedangkan mobilitas vertikal ditandai oleh meningkatnya peranan santri dari strata terbawah atau menengah ke strata yang lebih tinggi; misalnya ke pemerintahan atau ke struktur bisnis besar-moderen.

Selanjutnya, mereka banyak terserap ke dalam birokrasi sebagai akibat dari membengkaknya lembaga-lembaga pemerintahan dan cabang-cabangnya seperti kantor-kantor pemerintah dan BUMN. Maka yang terjadi kemudian adalah "priyayisasi" anak-anak kaum santri.<sup>14</sup> Muncullah kemudian kelompok muslim yang bukan pengusaha tetapi para pegawai pemerintah maupun swasta yang bergaji cukup tinggi dengan tingkat kesalehan tertentu. Berawal dari sini, diantaranya, Islam tersosialisasi di kalangan para pejabat dengan diterimanya berbagai ritual dan simbol-simbol Islam di kalangan mereka.

Di lingkungan pelajar dan mahasiswa religiositas Islam meningkat. Aktivitas keislaman seperti forum pengajian, dakwah dan aktivitas Islam yang lain kian marak. Jilbabisasi terjadi di

<sup>14</sup> Mohtar Mas'ood, *Islamisasi Negara Dan Islamisasi Masyarakat dalam Arif Affandi*, op. cit. hal. 76-77.



kampus-kampus termasuk kampus-kampus negeri yang umum sekalipun. Di kalangan kaum menengah dan elit juga terjadi hal serupa. Dengan gaya "gedongan", mereka melakukan kegiatan keagamaan di hotel-hotel berbintang. Di lingkungan Instansi swasta dan pemerintah, terjadi apresiasi keagamaan yang tidak kalah maraknya.

Perubahan kondisi umat secara sosiologis tersebut, melahirkan satu generasi Islam dengan mutu intelektualitas yang lebih baik yang dengan demikian lebih mampu bersaing untuk jabatan publik maupun politik. Dalam arena politik yang lebih luas muncul para aktor dengan agenda politik yang lebih canggih.

Pada arasy ide dan gagasan, menjelang tahun 1980-an khasanah pemikiran Islam diperkaya dengan pemikiran-pemikiran alternatif baik dalam bidang teologi, politik maupun sosial ekonomi.

Beberapa tokoh tampil dengan gagasan-gagasan segar yang meramalkan diskursus intelektual dasawarsa itu. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual

*Fenomena ketegangan antara kelompok Islam dengan Orde Baru sering dilihat sebagai puncak dari pertarungan panjang antara kekuatan Islam dan tradisi abangan Jawa, yang berakhir dengan kemenangan mutlak bagi kaum abangan*

mereka mengemukakan fungsionalisasi ajaran-ajaran Islam guna mengatasi masalah-masalah kongkrit umat seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan sebagainya. Secara umum dapat dikatakan ide-ide mereka tidak bersifat normatif dan doktriner. Tetapi lebih berorientasi pada dimensi empiris dan realitas historis umat Islam Indonesia. Salah satu yang menonjol adalah perubahan paradigmatis pada soal-soal kebangsaan dan kenegaraan. Jika sebelumnya "Islamisasi Negara" dengan gagasan-gagasan ideologis-oposisional menjadi orientasi yang dominan, maka oleh mereka hampir tidak pernah dikemukakan. Cita-cita "*iqamatuddaulah islamiyah*" melalui perjuangan di partai-partai Islam sedapat mungkin dipinggirkan. Karena itu, pemikiran-pemikiran

yang bermuatan ideologis ditempatkan sebagai bahan kajian semata. Sebagai derivasi dari gagasan ini, pemahaman keislaman yang toleran dan menghargai keragaman termasuk pluralitas agama ditawarkan dengan berbagai aliran pemikiran masing-masing. Maka Islam ditempatkan bukan sebagai satu-satunya *way of life* yang mengatasi "cara hidup" yang lain, tetapi hanya sebagai salah satu varian dari sekian banyak pilihan. Oleh karena itu Pancasila diterima sebagai payung keragaman itu.

Perkembangan pada tingkat gagasan ini memberikan pengaruh yang besar khususnya pada perkembangan gerakan Islam. Pelan-pelan, ia menyebabkan mengendurnya orientasi ideologis dengan melunaknya tuntutan para aktivis Islam dalam perjuangan politik. Meskipun tentunya orientasi ideologis tidak hilang sama sekali di

kalangan aktivis gerakan Islam akan tetapi gagasan baru ini tetap memberikan pengaruh paling tidak pada pilihan-pilihan agenda perjuangan. Hal ini bisa kita amati pada munculnya apa yang disebut "Islamisasi Negara"

yang non-konvensional, yaitu perjuangan politik yang tetap bertujuan mengatur masyarakat dengan hukum Islam melalui piranti negara akan tetapi dengan strategi yang lebih akomodatif, tidak konfrontatif dan lebih canggih. Belajar dari pengalaman masa lampau di mana strategi "Islamisasi Negara" dengan gaya konvensional selalu mengalami kegagalan maka para aktivis kelompok ini mengembangkan sebuah strategi perjuangan dengan agenda berbeda.<sup>15</sup>

"Pelunakan" yang terjadi pada gerakan Islam ini, rupa-rupanya telah merubah cara pandang pemerintah terhadap umat Islam. Negara melihat umat Islam tidak lagi menjadi ancaman "ekstrim kanan" yang perlu di "gebuk". Perubahan yang cukup signifikan dalam hubungan Islam dengan birokrasi Orde Baru ditengarai lahirnya pola yang

saling akomodatif, di mana masing-masing pihak berupaya mewujudkan saling pengertian (*mutual understanding*) yang bermuara pada munculnya konvergensi. Yakni kesediaan untuk saling memberi dan menerima yang berakar dari kemantaban masing-masing terhadap dirinya dan hilangnya kecurigaan dan kekhawatiran yang pernah muncul di antara mereka.<sup>16</sup> Inilah yang kemudian disebut "politik akomodasi Islam". Bahkan dalam pandangan Fachry Ali, pemerintah sedang melakukan upaya "pribumisasi negara" (baca wawancara dengan Fachry Ali pada *Polemik*, red.).

Sikap akomodatif pemerintah terhadap umat Islam ini rupanya memperoleh moment terjadinya pergeseran aliansi elit politik mutakhir ke arah kebutuhan kepada *beck up* massa Islam. Melemahnya aliansi ABRI, lembaga kepresidenan, Kristen-sekular memberikan peluang bagi naiknya posisi umat Islam di tingkat percaturan politik di Indonesia. Maka berbagai faksi yang bersaing merasa perlu memperoleh dukungan umat Islam. Sebagai konsekuensi dari menaikinya posisi tawar umat Islam, maka dibuatlah berbagai kebijakan yang mengakomodir kepentingan ummat Islam seperti UU Perkawinan (1988), UU Pendidikan Nasional (1989), lahir dan menguatnya ICMI, dibentuknya Bank Mu'amat Indonesia dan sebagainya. Selain itu, beberapa tokoh yang dianggap sebagai representasi umat Islam diberi peluang untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Lalu, lambat laun, simbol-simbol Islam mengemuka dan diterima di berbagai institusi negara.

Apakah dengan demikian persoalan peran Islam dalam negara-bangsa telah terselesaikan? Jawabnya kita bisa peroleh dengan melihat sejauh mana cita-cita kemerdekaan yang mendasari lahirnya bangsa ini telah terwujud. Sudahkah masyarakat adil makmur sebagaimana diuraikan

dalam Mukaddimah UUD 1945 telah tercapai?

Dari berbagai pengamatan yang dikemukakan selama ini, situasi kenegaraan kita belum banyak mengalami perubahan dari masa-masa sebelumnya. Bahkan, ada sementara pihak yang menilai telah terjadi kemunduran mutu penyelenggaraan negara. Persoalan pelaksanaan demokrasi dan penghargaan pada hak asasi manusia dan sebagainya, semakin menjadi problem yang memprihatinkan. Tercatat sejak 1989, sejumlah besar negara di pelbagai belahan dunia dan benua telah melaksanakan reformasi dan bergerak ke arah kategori kemunculan kembali demokrasi, dan memproklamirkan dukungan terhadap hak-hak asasi manusia internasional dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Namun naga-naganya perubahan global itu belum akan merambat ke Indonesia. Berdasar sejumlah pengamatan, banyak pihak yang pesimis akan masa depan demokrasi dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Padahal tidak bisa dipungkiri betapa banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan negara melalui aparat-aparatnya selama ini. Pelanggaran itu meliputi pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik, maupun pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>17</sup> Pendeknya, realitas politik Orde Baru belum banyak berubah dengan hadirnya kelompok Islam di dalamnya. Islam berbicara dalam konteks kenegaraan masih dalam tataran simbol-simbol. Pesan-pesan dasar Islam seperti kesetaraan, keadilan dalam hukum, politik dan ekonomi, partisipasi rakyat serta pemerintahan yang bersih belum tampak sosoknya.

Di dalam menanggapi meluasnya kesempatan untuk ikut serta dalam proses kenegaraan, di kalangan umat Islam tidak pernah ada kesamaan pola pengembangan umat, sehingga terjadi polarisasi yang cukup tajam antar berbagai gerakan Islam. Di dalamnya terdapat keragaman

<sup>16</sup> M. Syafii Anwar, op.cit. hal. 16.

<sup>17</sup> Satya Arinanto, "Ketetapan MPR tentang Demokrasi dan HAM", Kompas, Senin, 20 Oktober 1997, hal. 22.

<sup>18</sup> Abdurrahman Wahid, op.cit. hal. 113.

paradigma, strategi dan varian pendekatan yang sering kali berlawanan. Meski secara umum gagasan yang lebih kontekstual dan inklusif telah disepakati oleh sebagian besar kalangan Islam, namun pada perkembangan selanjutnya, terdapat berbagai perbedaan mendasar maupun nuansa di dalam masing-masing kecenderungan yang menggejala. Sebab-sebab ketidaksamaan antara masing-masing gerakan ditentukan oleh: *Pertama*, latar belakang dan sikap historik masing-masing gerakan, termasuk muatan ideologisnya. *Kedua*, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. *Ketiga*, pemahaman masing-masing akan hubungannya dengan sistem kekuasaan yang ada. Faktor-faktor ini sangat menentukan corak interaksi internal dan eksternal gerakan-gerakan Islam.<sup>18</sup>

Secara umum, dan sedikit menggeneralisasi, setidaknya terdapat dua paradigma yang berkembang:

*Pertama*, paradigma yang menginginkan diwujudkan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pranata negara. Singkatnya paradigma ini

*Perubahan kondisi umat secara sosiologis tersebut, melahirkan satu generasi Islam dengan mutu intelektualitas yang lebih baik yang dengan demikian lebih mampu bersaing untuk jabatan publik maupun politik*

menghendaki “berangkat dengan agama untuk memecahkan masalah bangsa”.<sup>19</sup> Paradigma ini mencakup pandangan yang menghendaki “Islamisasi negara demi Islamisasi masyarakat”,<sup>20</sup> baik dalam bentuknya yang konvensional maupun yang non-konvensional. Juga masuk dalam cakupan paradigma ini apa yang oleh Mochtar Mas’ud disebut “Islamisasi masyarakat dalam negara

nasional”.<sup>21</sup> Pandangan yang disebut terakhir ini mengemukakan bahwa Islam mampu menjadi sistem sosial yang terbaik yang bisa menjamin demokratisasi yang sesungguhnya, kepatuhan yang ketat kepada hukum dan keadilan ekonomi. Singkatnya, kelompok ini mengidealkan terbentuknya sebuah masyarakat yang Islami. Meskipun ia tidak menghendaki diwujudkan negara Islam, akan tetapi pada hakekatnya ia memiliki tujuan akhir yang sama yakni; formalisasi ajaran lewat perangkat hukum.

Sedang yang *kedua*, adalah pandangan yang mengatakan bahwa Islam seharusnya tidak menampilkan diri dalam bentuk eksklusif. Dalam hal ini, Islam tidak menampilkan warna keislamannya, tetapi mengintegrasikan kegiatannya dalam kegiatan bangsa secara keseluruhan. Tema-tema dan pilihan masalahnya adalah masalah yang dihadapi bangsa.

Paradigmanya, “berangkat dari agama untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa”.<sup>22</sup> Pandangan ini mengemukakan bahwa Islam berperan sebagai sumber inspirasi dan motivasi

bukan sebagai dasar sistem sosial yang berlaku secara keseluruhan. Dalam konteks ini Islam bukan alternatif bagi sistem sosial yang lain namun faktor pelengkap dari spektrum yang lebih luas dari faktor-faktor lain dalam kehidupan bangsa. Tokoh yang berbicara banyak soal ini adalah Abdurrahman Wahid. Modus keberadaan politik yang diperjuangkan Wahid adalah komitmen

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>20</sup> Istilah ini diperkenalkan oleh Mohtar Mas’oed dalam Mohtar Mas’oed, op.cit. hal. 76.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Abdurrahman Wahid, op.cit. hal. 110.

<sup>23</sup> Muhammad AS. Hikam Gus Dur Dan Pemberdayaan Politik Umat dalam Arif Affandi, op.cit. hal. 91.

terhadap sebuah tatanan politik yang dihasilkan oleh proklamasi kemerdekaan di mana semua warga negara memiliki derajat yang sama tanpa memandang asal-usul agama, ras, etnis, bahasa dan jenis kelamin. Konsekuensinya, politik umat Islam di Indonesia pun terikat kepada komitmen tersebut. Segala bentuk eksklusifisme, sektarianisme, dan privilege-privilege politik harus dijauhi. Termasuk di sini adalah pemberlakuan agama melalui negara dan hukum formal, demikian juga ide proporsionalitas dalam perwakilan dalam lembaga-lembaga negara. Kerena tuntutan-tuntutan seperti ini adalah berlawanan dengan asas kesetaraan (egalitarianisme) bagi warga negara. Implikasi lain dari komitmen Wahid atas asas kesetaraan adalah penolakannya akan ide pembentukan masyarakat dan negara Islam sebagai tujuan politik umat Islam Indonesia. Menurutnya, kedua ide tersebut pada prinsipnya terdapat kesamaan tujuan: formalisasi ajaran lewat perangkat hukum. Makanya, ia melihat tidak perlu ada masyarakat Islam di negeri ini, yang perlu

*Jika sebelumnya "Islamisasi Negara" dengan gagasan-gagasan ideologis-oposisional menjadi orientasi yang dominan, maka oleh mereka hampir tidak pernah dikemukakan*

diperjuangkan umat Islam dalam politik adalah sebuah masyarakat Indonesia di mana "ummat Islam yang kuat dalam pengertian berfungsi dengan baik" sebagai warga negara sebagaimana yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain.<sup>23</sup> Melalui ormas yang dia pimpin, pada tahap yang paling awal, Wahid cukup berhasil dalam menyelesaikan problem ideologis antara Islam dengan Pancasila. NU, sebagai ormas besar di negeri ini, menyatakan Pancasila sebagai ideologi final negara. Sebagai tindak lanjut dari capaian awal tersebut, Wahid menceburkan dirinya ke dalam demokratisasi dengan memberdayakan masyarakat (*civil society*).

Selain keragaman yang lahir dari perbedaan paradigma dan tujuan yang hendak dicapai, persoalan pemahaman dan cara pandang atas pola hubungannya sendiri dengan sistem kekuasaan yang ada juga melahirkan perbedaan dalam orientasi dan "agenda" berbagai gerakan Islam itu. Ada gerakan Islam yang memandang tujuan dan sasaran masing-masing akan lebih berhasil melalui hubungan yang dekat dengan pemerintah, bahkan bilamana perlu dengan memasuki kekuasaan itu sendiri baik sebagai pelaku langsung maupun hanya sebagai perumus kebijakan dan atau jalur penetapan (*king makers*) bagi personalia yang bergerak dalam pemerintahan. Pandangan ini melihat bahwa untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan perubahan sosial, maka orang Islam harus masuk ke dalam pemerintahan. Maka bagi mereka, nilai-nilai muslim tidak hanya bisa menjadi

pelengkap dari badan-badan nasional, tetapi mereka harus menguasainya. Karena itu capaian antara untuk mewujudkan sistem sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu, adalah

penguasaan pada lembaga-lembaga pemerintahan.

Di pihak lain, muncul sikap untuk lebih mengutamakan pengembangan kemampuan melakukan perubahan, tanpa harus masuk ke dalam sistem kekuasaan. Selama hubungan baik dengan pemerintah dijaga agar tetap terjadi harmoni pada tingkat tertentu, dianggap sudah memadai. Kiprah kelompok-kelompok Islam ditekankan pada transformasi interen kehidupan para warga masing-masing. Dengan demikian, agenda yang ditempuh antara lain: *Pertama*, menekankan upaya *community development* untuk memperbaiki kondisi kehidupan umat Islam di tingkat bawah. *Kedua*, mencari alternatif

<sup>24</sup> Mohtar Mas'ood, op.cit, hal. 78.

terhadap peranan pemerintah yang berlebihan. Ketiga, memanfaatkan "lembaga-lembaga alternatif" dan jaringan non pemerintah.<sup>24</sup>

Untuk "menampung" dua paradigma dan tujuan akhir serta dua sikap dalam hubungannya dengan kekuasaan, yang diterangkan di atas, hingga saat ini berkembang tiga varian pendekatan masalah.<sup>25</sup> *Pertama*, pendekatan sosial-politis, yang menekankan perlunya keikutsertaan dalam sistem kekuasaan yang ada dengan prinsip *representatifnes*. Umat Islam sebagai mayoritas warga negara, -menurut penganut pendekatan ini- akan adil dan fair jika diberikan jatah kekuasaan yang lebih besar. Pendekatan ini lebih menampilkan warna ideologis Islam, termasuk watak eksklusivistik dari ajaran Islam terhadap agama, ideologi dan faham-faham lain. Kredo yang dipakai adalah "kepentingan Islam" dengan tali pengikat "ukhuwwah Islamiyah". Sikap eksklusiv dan sektarian yang berkembang dalam pendekatan ini terlihat dari semangat anti Kristen dan anti Cina.

Karena mementingkan keharmonisan hubungan dengan pemerintah, dengan sendirinya, segala hal harus dinomorduakan, termasuk demokratisasi politik yang berintikan membangun struktur masyarakat yang lebih adil. Sikap menyerahkan masalah itu kepada kemauan baik (*political will*) pemerintah menjadi umum, kalau perlu dengan membiarkan kemungkinan friksi dengan kelompok-kelompok pejuang Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, demokratisasi dan sebagainya.

Varian yang *kedua* adalah pendekatan kultural (semata budaya). Pendekatan ini cenderung menampilkan sosok Islam dalam kesadaran hidup

sehari-hari, tanpa perlu mengkaitkan dengan kelembagaan apapun. Jika memerlukan pelembagaan, hal itu semata-mata dalam konteks mendukung penyebaran Islam secara budaya itu sendiri. Contoh kasus yang bisa kita saksikan adalah lahirnya pengajian-pengajian "gedongan", Yayasan Fakaf Paramadina dan sebagainya. Karakter penting dari pendekatan ini adalah diutamakannya wawasan universal dari Islam sebagai perwujudan sebuah peradaban dunia, tidak dan tanpa mengkaitkannya dengan sistem kekuasaan apapun. Namun, dalam kenyataannya dapat saja terjadi mutasi watak pendekatan ini kepada orientasi mementingkan "agenda Islam" atas "agenda nasional" pada proponent tertentu. Meskipun menginginkan basis perjuangan yang lebih luas, melibatkan upaya perubahan sosio kultural yang memungkinkan umat Islam

menanggapi tantangan zaman dan bebas dari kungkungan perpolitikan lama yang "divisive", sempit dan elitis, tetapi ia tetap menempatkan "masyarakat Islami" kendati sekedar sebagai komunitas yang dibayangkan (*imagined community*).<sup>26</sup>

*Ketiga*, pendekatan sosio-kultural. Pendekatan ini mengutamakan sikap mengembangkan pandangan dan perangkat kultural yang dilengkapi oleh upaya membangun sistem kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan wawasan budaya yang dicita-citakan. Pendekatan ini mementingkan kiprah budaya dalam konteks pengembangan lembaga-lembaga yang dapat mengubah struktur masyarakat dalam jangka panjang, tanpa menganggap penting masuk atau tidaknya ke dalam sistem kekuasaan. Dengan demikian, mereka dapat memasukkan "agenda Islam" ke dalam

*Negara melihat umat Islam  
tidak lagi menjadi ancaman  
"ekstrim kanan" yang perlu  
di"gebuk*

<sup>25</sup> Tiga varian pendekatan ini dikembangkan dari pandangan Abdurrahman Wahid dalam Abdurrahman wahid, op.cit. hal. 114-116.

<sup>26</sup> Muhammad AS. Hikam, op.cit, hal. 92.

<sup>27</sup> Nicos Poulantzas, *Fascism and Dictatorship* (New Lef Book, 1974) sebagaimana dikutip oleh Burhan

“agenda Nasional” bangsa ini tanpa kesulitan karena keterkaitannya kepada sistem kekuasaan. Pendekatan ini banyak didukung oleh kalangan LSM muslim, ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan kalangan pesantren.

Rupa-rupanya, berbagai pendekatan yang ditempuh oleh gerakan-gerakan Islam ternyata belum memberikan manfaat yang berarti, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terjadi karena apa yang disebut sebagai “politik akomodasi Islam” muncul dalam situasi sistem kekuasaan yang hegemonik dan tidak demokratis. Dengan demikian ia lahir sebagai hasil dari “kebaikan hati” penguasa Orde Baru, bukan sebagai hasil dari tawar-menawar dalam konteks politik yang wajar dan demokratis. Dengan demikian, kekuatan Islam tetap tidak memiliki peluang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan nasional dan dipaksa untuk tunduk pada “ arus utama ” yang dikehendaki pemerintah.

Bagi kelompok yang menerapkan strategi masuk ke dalam lingkaran kekuasaan terpaksa harus bermain dalam kancuh yang penuh resiko. Sebab, kemungkinan untuk terdepak dari arena kekuasaan muncul sewaktu-waktu ketika kiprah mereka lepas dari “rambu-rambu” resmi. Maka tidak heran jika mereka pun terkooptasi dan larut dalam irama politik penguasa. Kebebasan mereka untuk menyuarakan kebenaran dan kritis pada pemerintah terbentur tembok kekuasaan yang lebih dominan. Dalam proses rekrutment politik pemerintah atas kalangan Islam, yang paling mungkin, pemerintah merasa aman ketika merekrut orang-orang yang diyakini memiliki loyalitas lebih. Dengan demikian bisa diduga orang-orang yang diakomodir lebih banyak terdiri dari orang-orang yang cenderung lebih mendukung sistem yang ada.

Sedangkan mereka yang tetap berada di luar kekuasaan dan memosisikan dirinya untuk kritis pada kekuasaan seringkali dipatahkan oleh kekuatan pemerintah. Aparat ideologis maupun

aparatus represif terlalu kuat untuk mereka siasati.

### “Wacana Resmi”

Telah menjadi kelaziman, karena berbagai privilege yang tersedia, kekuasaan memiliki daya tarik yang sangat besar. Itulah sebabnya, para elit gerakan Islam berbondong-bondong, dengan semangat tinggi dan tidak jarang melalui persaingan yang ketat antar sesama mereka, masuk dalam lembaga-lembaga kekuasaan. Maka sebagian besar potensi umat Islam yang berporos pada kalangan menengahnya terserap ke dalam negara. Akibatnya, kekuatan umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari kekuatan masyarakat menjadi berkurang. Sebaliknya, negara menjadi semakin kuat. Dalam sebuah negara yang hanya melayani kepentingannya sendiri (*self serving*) dan memperbesar kekuasaannya sendiri (*self aggrandising*) maka apapun yang menjadi integral di dalamnya akan dimanfaatkan dalam upaya memperkuat dirinya sendiri. Dalam kondisi demikian, dominasi negara atas masyarakat sipil menjadi semakin kokoh.

*Pendeknya, realitas politik Orde Baru belum banyak berubah*

Dalam *Fascism and Dictatorship* Nicos Poulantzas mengemukakan bahwa negara berperan penting di dalam menciptakan “kebudayaan politik”. Negara, menurutnya, selain membuat “aparatus represif” demi mempertahankan sistem politik yang ada, juga menciptakan “aparatus kebudayaan” yang menjadi alat untuk sosialisasi politik serta menciptakan arah untuk “kebudayaan politik”. Termasuk dalam “aparatus kebudayaan” itu adalah sekolah, organisasi-organisasi sosial di luar lembaga-lembaga politik serta lembaga-lembaga keagamaan.<sup>27</sup> Di negara-negara komunis praktek memonopoli sosialisasi politik seperti ini dikenal sebagai “indoktrinasi”. Dengan demikian, elit politik juga akan mengikuti pikiran-pikiran yang ada sehingga dapatlah disebut “kebudayaan politik yang bersifat resmi”.<sup>28</sup> Oleh karena itu, ketika tokoh-tokoh Islam integral dengan negara maka ia

terserap ke dalam negara dan menjadi "aparatur negara".<sup>29</sup> Mereka kemudian dimanfaatkan oleh negara untuk menjadi "aparatur ideologis".

Tokoh-tokoh yang dianggap representasi umat kemudian dengan terpaksa atau suka rela cenderung mensosialisasikan pandangan-pandangan keagamaan yang legitimatif kepada kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah. Pandangan keagamaan semacam ini lebih mewarnai opini publik karena dalam tatanan yang serba negara, pemaknaan atas realitas sepenuhnya ditentukan oleh negara. Yang terjadi setelah itu adalah dominannya representasi Islam yang lebih berwarna status quo. Maka wacana yang muncul kemudian adalah wacana Islam yang "resmi". Yakni wacana yang cenderung menjadi alat bagi berbagai kepentingan negara. Agama digunakan oleh Orde Baru dari mensupport implementasi program pembangunan hingga melegitimasi sistem politik negara. Wacana "resmi" pada gilirannya tidak memberikan peluang dan mengusur wacana lain. Karena didukung oleh kekuasaan maka ia berhasil mendominasi wacana publik. Akibatnya, wacana selain wacana "resmi" seolah tidak bersuara di kalangan masyarakat. Maka seolah-olah ia menjadi satu-satunya wacana yang ada di tengah umat. Ia menjadi wacana tunggal umat Islam. Ia menjadi representasi suara umat Islam.

Wacana "resmi" yang memiliki karakter elitis, seragam dan membela keamanan ini sedemikian

*Islam berperan sebagai  
sumber inspirasi dan motivasi  
bukan sebagai dasar sistem  
sosial yang berlaku secara  
keseluruhan*

dalam membenam di ruang kesadaran pendukung gerakan Islam. Mereka melihat bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah menjadi sulit untuk tidak diamini. Di kalangan gerakan Islam sendiri lambat laun terbentuk opini yang kurang lebih berbunyi "karena umat Islam sedang berbulan madu dengan pemerintah, maka kita jangan merusak kemesraan ini. Mumpung sedang dekat, maka gunakanlah kesempatan ini untuk 'kepentingan Islam'". Di sini terlihat bahwa "agenda khusus Islam" dalam wacana resmi ini cukup kuat. Hal ini mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup mengingat pemerintah juga menerapkan kebijakan "pengelolaan konflik". Sehingga pada kadar tertentu eksklusivisme Islam juga dipelihara oleh pemerintah sebagai pelemah *bargaining* politik umat Islam. Bermula dari pandangan yang demikian maka berbagai gerakan

Islam tidak menaruh kepedulian pada persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat terlebih ketika melibatkan pemerintah. Bahkan mereka mengambil jarak dengan persoalan masyarakat dan acapkali terlihat terburu-buru mendukung pemerintah ketika terjadi sengketa

antara pemerintah dengan yang bukan pemerintah. Maka seringkali gerakan-gerakan Islam berseberangan dengan kelompok pro demokrasi.

Kesimpulan yang bisa ditarik, perkembangan hubungan umat Islam dengan pemerintah dalam "era baru" hanya mengakomodir kepentingan para elit umat Islam tanpa menyentuh kepentingan

Magenda "Aspek Keadilan Sosial dalam Kebudayaan Politik Indonesia: Beberapa Pendekatan teoritis" dalam Ismid Hadad, (ed.), "Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial" (Jakarta: LP3ES, 1979) hal. 19.

<sup>28</sup> Irving Louis Horowitz, "Power, Politic and People: The Collected Essays of C. Wright Mills sebagaimana dikutip Burhan Magenda, *ibid*.

<sup>29</sup> Poulantzas membedakan pengertian antara "aparatur negara" dengan "penguasa negara". Jika yang disebut kedua ia maksudkan kekuasaan oleh kelas yang dominan yang memiliki wewenang menentukan kebijakan maka yang pertama sekedar menjalankannya. Lihat, Burhan Magenda, *ibid*.

<sup>30</sup> Lihat, Aswab Mahasin, "Dua Versi Islam", Prisma No. 4, April 1984, Tahun XII, hal. 2. Cermati juga

masyarakat umum. Rakyat masih berada dalam situasi yang tidak diuntungkan oleh adanya "kedekatan". Keadilan politik, ekonomi dan hukum belum dirasakan oleh mereka. Umat Islam di bawah tetap tersisihkan kepentingannya sebagai warga negara yang memiliki hak sama. Semetara itu, karena elit Islam menikmati kekuasaan yang diberikan oleh Orde Baru, mereka terlihat cenderung mempertahankan status quo dengan jalan melegitimasi kekuasaan yang ada.

### Wacana "Tak Resmi"; Islam Versi Rakyat.

Di luar tembok "istana" berkembang Islam versi lain yang lebih sederhana, tak canggih, tidak skolastik, tetapi populer, hangat, dan menggelora. Sebaliknya dari menekankan legitimasi penguasa, versi ini lebih egalitarian dan populis. Malahan, seringkali mengesankan watak anti struktur yang hampir-hampir anarkis. Islam versi ini, -berbeda dengan versi "resmi" yang pasang surutnya sejalan dengan pasang surut penguasa- tidak terlalu tergantung pada struktur kedaulatan tertentu, bertahan hidup dan mengembara sepanjang sejarah. Ada kalanya ia tampak sebagai sejenis sempalan subkultur di daerah perdikan, di

*Di luar tembok "istana" berkembang Islam versi lain yang lebih sederhana, tak canggih, tidak skolastik, tetapi populer, hangat, dan menggelora*

pinggiran negeri, yang menempatkan diri sebagai oposisi terhadap para raja yang lalim, tetapi tak jarang ia muncul sebagai gerakan sosio-religius yang kronis dan meluas seperti mesianisme (Ratu Adil) di abad sembilanbelas. Di masa awal

nasionalisme bahan yang laten ini pernah dibangkitkan sebagai tenaga yang hebat, ketika "selam" (Islam) berarti "pribumi"- suatu kubu lain dalam penghadapannya dengan kekuasaan kolonial yang menindas. Kita barangkali bisa menyebutnya "Islam versi rakyat".<sup>30</sup> Terlihat dari gerakan yang ditimbulkannya, Islam versi ini menunjukkan ciri yang tegas yakni semangat menegakkan keadilan dan menentang kedlaliman yang didasari kesadaran religius (*amar ma'ruf nahi munkar*). Bahan yang laten ini, seperti telah menyejarah, selalu muncul sebagai reaksi atas tatanan kehidupan yang tidak adil.

Lalu apakah fenomena meningkatnya kecenderungan kerusuhan (yang sebagian besar pelakunya umat Islam kalangan bawah) adalah perwujudan dari Islam versi rakyat?.

Berdasar analisa yang banyak dikemukakan, secara umum, sebab-sebab rentetan kerusuhan massal menjelang dan awal 90-an, sebelum dan sebagai reaksi pelaksanaan Pemilu 1997 dan kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini adalah

kekecewaan atas berbagai masalah sosial-ekonomi (kemiskinan dan kesenjangan sosial), birokrasi (pelayanan yang buruk dan korup), politik (pelucutan hak-hak politik) dan hukum (ketidakadilan dan ketidakpastian hukum). Sedangkan dalam berbagai peristiwa kerusuhan politis, penyebab utamanya adalah munculnya deprivasi politik (*political deprivation*) di kalangan masyarakat umum di luar "kelompok" pemerintah. Yakni sebuah situasi yang

pernyataan Ali Syari'ati: "Adalah tidak cukup dengan menyatakan kita harus kembali kepada Islam. Kita harus menspesifikasi Islam mana yang kita maksudkan: Islam Abu Dzar atau Islam Marwan, sang penguasa. Keduanya disebut Islam meskipun terdapat perbedaan besar antara keduanya. Satunya adalah Islam kekhalifahan, istana dan penguasa. Sedangkan yang lainnya adalah Islam rakyat, kaum yang tereksplorasi dan miskin". Cuplikan ini diambil dari Azyumardi Azra, *op. cit.*, hal. 77.

<sup>31</sup> Baca Azyumardi Azra, "Pekalongan dan Deprivasi Politik", Forum Keadilan: No. 01, Tahun VI, 21 April



di dalamnya terdapat kalangan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan kehidupan politik yang jujur, adil dan fair. Sebaliknya, mereka merasakan, proses dan kehidupan politik yang berlangsung mengakibatkan terjadinya *dispossession*, pelucutan hak-hak politik mereka. Segala deprivasi tersebut menimbulkan krisis kejiwaan dan kepribadian individu dan masyarakat, yang sering dikarakterisasi dengan bentuk alienasi akut, yang mencakup perasaan tidak berdaya (*powerlessness*), ketiadaan norma (*normlessness*), rasa tidak aman, dan pengucilan diri sendiri (*self-estrangement*) yang oleh Durkheim disebut "anomie". Situasi "anomie" yang sampai pada titik ekstrem dapat semakin meningkatkan keterhimpitan psikologis yang, anehnya, berpadu dengan harapan yang semakin tinggi kepada terjadinya perubahan, dan akhirnya kerentanan, yang meningkat terhadap tarikan massa.<sup>31</sup> Harapan-harapan akan perubahan yang tidak bisa tersalurkan dengan cara-cara damai melalui wadah konstitusional ini mendorong mereka melakukan aksi kekerasan terhadap lingkungan yang dipandang menguasai kehidupan. Berangkat dari analisa yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa kerusuhan itu muncul dan di semangati oleh ketidak relaan atas ketidakadilan yang berlangsung sehari-hari.

Lalu, adakah motifasi agama di dalamnya sehingga bisa dibilang gerakan sosio-religius? Pada umumnya, hal ini dibantah. Para elit gerakan Islam, aktivis LSM, para pengamat memandang

serentetan kerusuhan itu sebagai semata-mata akibat kesenjangan sosial serta marginalisasi politik dalam proses pembangunan. Sedang para pejabat birokrasi, elit militer, Golkar dan ormas *underbownya*, cenderung melihatnya sebagai semata-mata gangguan keamanan dan stabilitas sosial-politik. Maka tindakan yang diambil adalah memulihkan keamanan dengan menindak para pelakunya.<sup>32</sup>

Namun, berbagai pernyataan itu pada kenyataannya tidak sepenuhnya mampu menutupi kesan keterlibatan motif agama di dalamnya. Tanda-tanda yang menguatkan keterlibatan itu, misalnya kalimat "Allahuakbar" tertulis di berbagai tempat di sekitar kerusuhan dan kalimat tersebut sesekali diteriakkan di tengah-tengah

*Situasi "anomie" yang sampai pada titik ekstrem dapat semakin meningkatkan keterhimpitan psikologis yang, anehnya, berpadu dengan harapan yang semakin tinggi kepada terjadinya perubahan*

kerusuhan. Kemudian, sasaran amukan massa adalah komunitas-komunitas agama lain serta etnik yang identik dengan itu yakni keturunan Cina. Oleh karena itu, *graffiti* yang tertulis di tembok-tembok dan kaca-kaca bangunan di sekitar lokasi kerusuhan untuk menghindarkan dari amukan massa adalah "Milik Pribumi", "Milik Muslim", dan sebagainya.<sup>33</sup>

Dari sini kita tahu bahwa dorongan religius memberikan andil baik dalam aspek perlawanan terhadap yang dinilai dhalim -yang jika kita posisikan netral tentu positif- maupun aksi perusakan yang mengarah kepada komunitas etnis dan agama tertentu yang barang tentu merugikan.

1997.

<sup>32</sup> Baca, Ulil Abshar Abdalla, "Merusak Rumah Tuhan", D&R, No. 21/XXVIII/4 & 11 Januari 1997, hal. 14.

<sup>33</sup> M. Imam Azis/A. Suaedy, "Agama Dan Kerusuhan Suatu tatapan Islam", Basis No. 03-04, Tahun ke-46, Maret-April 1997, hal. 37.

<sup>34</sup> Lihat Al-Zastrow Ng, "Kok, Agama Jadi beringas", D&R, No. 23/XXVIII/ 25 Pebruari 1997, hal. 90.

Pemahaman keagamaan umat Islam di bawah berbeda dengan agama kaum elit. Ia tidak berangkat dari pemahaman keagamaan yang dibarengi dengan “kearifan-kearifan” skolastik dan canggih. Di dalamnya terdapat “kearifan-kearifan”nya sendiri yang sederhana tetapi acapkali melahirkan daya dorong yang besar bagi upaya “menindak” yang mereka nilai menyimpang. Akibatnya, ekspresi keagamaan seringkali timbul secara spontan tanpa didahului oleh pertimbangan-pertimbangan rasional dan acap kali hanya melihat “kearifan-kearifan”nya sendiri. Selanjutnya, tindakan-tindakan yang muncul menjadi hanya berbekal semangat dan akhirnya terjerumus ke dalam anarkisme yang merugikan. Misalnya, ketika muncul gerakan menentang ketidakadilan, ia lalu merembet pada sasaran-sasaran lain yang sebenarnya tidak memiliki kaitan apa-apa seperti soal ras dan agama.

Pemahaman keagamaan yang sederhana ini dicerminkan oleh suburnya pemahaman keberagaman yang fanatik emosional. Di kalangan sebagian besar umat Islam tarikan dimensi legal formalistik dan ritualistik agama masih sangat kuat. Proses keagamaan umat di bawah masih mengutamakan simbol-simbol formal dan mengutamakan aktivitas ritual dan mengabaikan ajaran yang universal. Dan yang paling penting, sentuhan ideologis emosional dalam pola penanaman rasa keberagaman lebih dominan, sementara kekuatan rasionalitas beragama terabaikan. Kenyataan itu terlihat pada tingginya sentimen emosional pada ajaran agama sendiri sehingga mereka hampir tidak bisa membedakan antara dogma dengan pemikiran terhadap dogma.<sup>34</sup> Dari model keberagaman semacam ini terdapat problem teologis khususnya menyangkut cara pandang terhadap umat lain yang berbeda agama serta lembaga-lembaga dan rumah ibadahnya. Dimensi teologis dan wacana keagamaan yang dapat menjadi pijakan bagi sikap yang toleran masih sangat jarang dikenal. Dalam *substratum* bawah-sadar mereka terdapat suatu cara pandang teologis

tertentu (teologi tempat ibadah) yang cenderung membenci rumah-rumah ibadah agama lain, terutama Kristen dan Katolik.<sup>35</sup> Bukti dari analisa ini adalah salah satu korban kerusuhan adalah kelompok non Islam, tempat ibadahnya dan lembaga-lembaga sosial-pendidikan yang dimilikinya.

Corak keberagaman yang hidup di tengah umat Islam di bawah sesungguhnya tidak terlepas dari model keberagaman yang mereka terima dari kaum elitnya. Selain itu, Apresiasi keagamaan yang potensial bagi intoleransi ini pada kenyataannya mendapatkan “angin” dari kecenderungan sebagian besar gerakan Islam yang eksklusiv-sektarian dan lebih mengutamakan “agenda Islam” di atas “agenda Nasional”.

Munculnya berbagai kerusuhan ini dapat dimaknai sebagai “bantahan” sekaligus “perlawanan” terhadap wacana “resmi” yang ditampakkan oleh para elit Islam. Kerusuhan yang marak itu menunjukkan bahwa peran Islam di dalam kebangsaan dan kenegaraan belum menemukan bentuk yang ideal. Kedekatan yang simbolistik itu ternyata tidak menyentuh aspek perbaikan terhadap tatanan kehidupan yang timpang yang memiliki kaitan langsung bagi perbaikan kehidupan umat Islam alias kehidupan sebagian besar rakyat bangsa ini.

Wacana “resmi” yang terlampau berfungsi legitimatif dan menarik jarak dengan gerakan demokratisasi berujung marginalisasi posisi umat Islam dalam sosial-politik dan ekonomi. Akibatnya, kondisi masyarakat yang timpang tidak segera dicarikan pemecahannya. Masyarakat dihadapkan pada berbagai ketidak berdayaan dalam mewujudkan hak-hak asasinya sebagai warga negara dan manusia yang bermartabat. Muara akhir dari berlarut-larutnya kondisi tidak sehat ini adalah munculnya bahan laten “agama versi rakyat” berwujud gerakan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.

Oleh karena itu, jika wacana “resmi” yang ditampilkan oleh elit gerakan Islam terus-menerus

<sup>35</sup> Ulil Abshar Abdalla, op.cit.

mendominasi, maka bibit-bibit ketidakpuasan akan semakin mendekati titik kronis. Pada taraf berikutnya, negara akan tidak legitimate di mata umat Islam. Jika kondisi ini tidak segera teratasi maka bukan tidak mungkin keutuhan bangsa akan terancam.

Sisi lain yang terkuak oleh fenomena kerusuhan itu adalah bahwa pengutamaan "agenda Islam" di atas "agenda nasional" berakibat buruk tidak saja pada kelompok non Islam tetapi juga kepada umat Islam sendiri. Semangat sektarianisme yang ditampakkan oleh gerakan-gerakan Islam membangkitkan citra yang menyeramkan dari agama yang hakikatnya *rahmatan lil alamin*. Dengan demikian, sebagai warga mayoritas, umat Islam akan kesulitan di dalam memerankan fungsi pengayom bagi umat lain sebagai pengakuan akan kesamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara.

Bercermin kepada serangkaian kerusuhan yang terjadi, maka pokok persoalan yang harus menjadi agenda utama umat Islam, khususnya gerakan Islam adalah perbaikan tatanan kehidupan bangsa melalui demokratisasi. Dalam hal ini upaya demokratisasi hendaknya dilakukan dua arah, ke dalam dan ke luar. Umat Islam dituntut untuk menempatkan asas-asas demokrasi dalam memilih paradigma perjuangan Islam, tujuan akhir serta strateginya. Dengan demikian, pandangan yang eksklusif dan sektarian yang terbukti menimbulkan interaksi yang tidak sehat dalam hubungan antar agama ini akan terminimalisasi. Lebih luas lagi, wawasan kebangsaan yang berasaskan kesetaraan seluruh warga negara apapun ras, budaya, bahasa dan agamanya akan terwujud. Perjuangan umat Islam dengan "agenda Islamnya" akan menjadi bagian yang integral dengan "agenda nasional". Kekuatan Islam akan berputar bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan bangsa menuju arah kedewasaan, kemajuan dan

integritas bangsa. Jika ini yang terjadi maka kesepakatan awal yang menjadi landasan berdirinya Republik Indonesia akan tetap lestari.

Di samping melakukan demokratisasi internal umat Islam, demokratisasi dalam skala bangsa dan negara mutlak diperlukan. Sebab, kondisi sosial yang memprihatinkan ini lebih disebabkan oleh lemahnya partisipasi rakyat dalam menentukan berbagai kebijakan. Absennya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara menimbulkan model pembangunan yang lebih menguntungkan kalangan elit dan mengenyampingkan kepentingan kalangan yang lebih luas yakni rakyat kecil.

Sebagai salah satu kekuatan politik yang besar, umat Islam memiliki peluang untuk melakukan demokratisasi. Oleh karena itu, kekuatan Islam, khususnya para aktor gerakan Islam yang tersebar hampir di semua lini, baik yang berperan "pengkritik" model pembangunan,

*sentuhan ideologis emosional dalam pola penanaman rasa keberagamaan lebih dominan, sementara kekuatan rasionalitas beragama terabaikan*

mengurusi masalah-masalah ritual, masuk dalam politik formal dan mereka yang terlibat dalam jajaran birokrasi punya kewajiban untuk bersama-sama melakukan demokratisasi. Dalam rangka ini, sikap saling memahami, tidak menyamakan, alih-alih menyeragamkan menjadi sangat penting. Meskipun tidak harus dikomunikasikan secara verbal mekanistik, jika telah saling memahami, akan terjadi suasana saling mendukung dan mengisi. Andai umat Islam mampu melakukan upaya demokratisasi maka mengenai problem kedudukan Islam dalam negara Republik Indonesia akan menemukan pintu-pintu yang longgar bagi penyelesaiannya dan ini adalah sumbangan yang sangat berharga bagi bangsa ini. \*\*\*

*Wallahu a'lam bishshawab.*

(M. Imdadun R., Ahmad Suaedi, Syafiq Hasyim)